



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2012-2013**

KAMIS, 25 OKTOBER 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2012-2013**

KAMIS, 25 OKTOBER 2012

**Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua,**

Yang kami hormati,

- **Para Wakil Ketua,**
- **Pimpinan Alat Kelengkapan DPR,**
- **Para Anggota DPR-RI,**
- **Hadirin yang berbahagia,**

Hari ini Dewan menutup Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013, yang telah dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2012. Masa Sidang I berjalan selama 47 hari kerja. Sebagaimana sidang-sidang DPR selama ini, pada Masa Sidang I, Dewan melakukan kegiatan terhadap pelaksanaan tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, DPR juga melakukan kegiatan terkait dengan penetapan pejabat publik.

Pada Masa Sidang ini, DPR telah memproses penetapan berbagai pejabat publik yaitu 1 (satu) Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dan 13 (tigabelas) Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan telah memberikan pertimbangan atas calon-calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Bangladesh, Mongolia, Republik Sierra Leone, dan Federasi Rusia. Adapun pejabat-pejabat publik lain yang masih dalam proses penanganan yaitu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hakim Agung dan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Diharapkan, pejabat-pejabat publik tersebut sudah dapat ditetapkan pada Masa Sidang II yang akan datang.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi Masa Sidang I 2012-2013, DPR bersama dengan Pemerintah telah menyelesaikan 5 (lima) RUU Prioritas dan 7 (tujuh) RUU Kumulatif Terbuka, dan telah disahkan menjadi Undang–Undang. RUU-RUU tersebut yaitu: [1] RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, [2] RUU tentang Industri Pertahanan, [3] RUU tentang Veteran Republik Indonesia, [4] RUU tentang Perkoperasian, dan [5] RUU tentang Pangan.

Sedangkan 7 (tujuh) RUU Kumulatif Terbuka yaitu: [1] RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2011, dan [2] RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013, serta 5 (lima) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yaitu: [3] Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, [4] Kabupaten Pegunungan Arfak, [5] Kabupaten Manokwari Selatan, keduanya di Provinsi Papua Barat, [6] Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, dan [7] Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Komisi, Badan Legislasi dan beberapa Panitia Khusus masih melanjutkan pembahasan 29 (duapuluh sembilan) RUU prioritas yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, dan 24 (duapuluh empat) RUU dalam proses penyusunan. RUU yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I dan diperpanjang masa pembahasannya, diantaranya adalah: RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L), RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Jaminan Produk Halal, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, RUU tentang Desa, RUU tentang Pemerintah Daerah, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan beberapa RUU lainnya.

Selama Masa Sidang I ini, Komisi dan Badan Legislasi juga telah menyusun beberapa RUU Prioritas sebagai usul inisiatif DPR sebagaimana telah ditetapkan di dalam Prolegnas. Yang terbaru adalah RUU tentang Kepalangmerahan dan RUU tentang Penyiaran.

Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari beberapa RUU yang telah selesai dibahas, diantaranya, **RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menjadi UU No. 13 tahun 2012** menggantikan UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 9 Tahun

1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No. 13 tahun 2012 mengatur secara lengkap keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kondisi saat ini. UU ini memberikan pengakuan dan penghormatan dari negara kepada satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

UU No. 13 Tahun 2012 merupakan instrumen yuridis demi berjalannya pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang demokratis, dan terwujudnya kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat dengan berlandaskan pada azas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinekatunggalikaan, efektifitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pedayagunaan kearifan lokal. UU ini memberikan kewenangan istimewa pada tata-cara pengisian jabatan, kedudukan, serta tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Dengan UU ini, DPR dan Pemerintah telah menangkap aspirasi warga Yogyakarta yang menginginkan pengisian gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan penetapan. Namun disisi lain, gubernur dan wakil gubernur juga tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis, karena gubernur dan wakil gubernur adalah milik semua golongan. Ini merupakan jalan tengah yang dapat diambil untuk menciptakan suasana yang tenang dan kondusif di Yogyakarta.

Pada tanggal 10 Oktober 2012, Saudara Sultan Hamengkubuwono X serta Saudara Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam IX telah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada kesempatan ini, Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI mengucapkan "selamat", semoga dengan adanya UU No. 13 tahun 2012, pasangan kepala daerah ini dapat membangun Daerah Istimewa Yogyakarta dengan lebih baik, lebih maju dan sejahtera, dengan tata kelola pemerintahan yang efektif bagi masyarakat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

RUU lainnya adalah RUU tentang Industri Pertahanan dan RUU tentang Veteran Republik Indonesia. Kedua RUU yang telah disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 2 Oktober 2012 ini, merupakan "hadiah dari rakyat

Indonesia” untuk Ulang Tahun ke-67 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 5 Oktober 2012. **RUU tentang Industri Pertahanan** memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan industri pertahanan nasional, sehingga dapat mendorong dan memajukan pertumbuhan industri, yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan peralatan pertahanan dan keamanan. Sementara **RUU tentang Veteran Republik Indonesia** yang menggantikan UU No. 7 Tahun 1967, mengakui dan memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para veteran yang telah berjuang, membela dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dan ikut melaksanakan perdamaian dunia.

Adapun **RUU tentang Perkoperasian** yang telah diselesaikan oleh Dewan melalui beberapa kali perpanjangan tugas, merupakan pengganti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini memuat pembaharuan hukum yang diharapkan mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu, namun jika ditinjau dari segi kualitas, kondisinya masih perlu perbaikan agar mampu berperan secara signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pembaharuan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan ikhtiar dan komitmen kita bersama untuk menjawab berbagai kendala yang selama ini menghambat perkembangan dan kemajuan Koperasi. Dengan lairnya UU Perkoperasian yang baru ini, benar-benar menjadikan Koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang efektif dalam upaya mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Demikian pula dengan **RUU tentang Pangan** yang telah diselesaikan oleh Dewan, telah mengatur tentang penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, agar dapat memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan, dengan berdasarkan kepada kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Pemenuhan konsumsi pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal secara optimal. Tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah: [1] ketersediaan pangan yang berbasis kepada pemanfaatan sumber

daya lokal secara optimal; [2] keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; dan [3] Pemanfaatan pangan dan konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Ada 2 (dua) RUU yang baru-baru ini menjadi perhatian publik yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2012. Oleh Komisi III selaku pengusul, telah disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi. Namun karena kepentingan yang lebih besar, maka penyusunan RUU ini tidak dilanjutkan. Mekanisme untuk hal ini akan disesuaikan dengan Tata tertib DPR dan Peraturan DPR-RI No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU.

Satu lagi, RUU tentang Keamanan Nasional. RUU ini telah mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Menyikapi dinamika yang berkembang, pemerintah tanggal 23 Oktober 2012 dalam rapat kerja pertama dengan Panitia Khusus telah menyampaikan RUU Keamanan Nasional yang telah mengalami revisi. Semula 66 pasal menjadi 55 pasal serta telah dilakukan penyesuaian dan diharapkan lebih integratif. RUU yang akan dibahas ini hendaknya jangan sampai "menabrak" UU yang sudah ada, dan hendaknya tetap mengedepankan supremasi sipil, mengakomodasi semangat reformasi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, hukum dan HAM yang selama ini kita perjuangkan bersama.

Dalam masa sidang ini, selain menghasilkan beberapa RUU yang siap untuk menjadi UU, DPR telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan DPR-RI, yaitu Peraturan No. 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi, No. 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, dan No. 3 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang.

Sidang Dewan yang terhormat,

RUU Kumulatif terbuka yaitu **RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011** berisikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2011 telah diaudit terlebih oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013 beserta nota keuangannya, baru saja diselesaikan. Sedikit tertundanya proses pembahasan ini, tentunya diarahkan untuk mengoptimalkan pilihan politik anggaran tahun 2013 di tengah-tengah kondisi semakin beratnya kondisi perekonomian kawasan dan global, yang terkait dengan hasil pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2013.

Dewan mencatat bahwa Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, dan dengan memperhatikan pertimbangan DPD-RI, telah menyepakati sejumlah asumsi dasar APBN tahun 2013 adalah: pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, inflasi 4,9%, nilai tukar Rp. 9.300,0 per US Dollar, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5%, harga minyak/ICP 100 US\$/barell. *Lifting* minyak 900,0 ribu barell/hari, *lifting* gas bumi 1.360,0 ribu barell setara minyak/hari dan *lifting* minyak dan gas bumi sebesar 2.260,0 ribu barell/hari.

Berdasarkan kesepakatan, belanja negara dalam tahun 2013 sebesar Rp 1.683,0 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.154,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp. 528,6 triliun. Untuk belanja Pemerintah Pusat, Dewan mencatat adanya "warna" yang sedikit berbeda dalam penentuan politik anggaran tahun 2013, dimana Badan Anggaran dan Pemerintah, **sepakat melakukan penghematan belanja barang khususnya melalui pemotongan belanja perjalanan dinas dalam kisaran 10-15%** dari nilai yang diusulkan dalam RUU APBN tahun 2013, disesuaikan dengan dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi setiap K/L untuk direalokasikan ke belanja modal K/L bersangkutan.

Pimpinan Dewan menggarisbawahi bahwa dari peruntukan DAK Reguler sebesar Rp. 29,7 triliun, juga dialokasikan untuk 12 bidang DAK dalam rangka *affirmative policy* sebesar Rp. 1,9 triliun bagi **183 daerah tertinggal**. Disamping itu, Dewan juga mencermati bahwa ke-183 daerah tertinggal ini juga

mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp. 2,0 triliun yang dialokasikan untuk 2 (dua) bidang DAK, yakni infrastruktur pendidikan dan infrastruktur jalan masing-masing Rp. 1,0 triliun.

Dewan menegaskan, bahwa meskipun seluruh asumsi dasar dan komponen APBN tahun 2013 telah disepakati bersama, Pemerintah tetap harus memberikan perhatian yang serius atas catatan penting dan pandangan/pendapat akhir mini Fraksi-fraksi DPR-RI atas pembahasan RUU APBN 2013, dalam rangka mengoptimalkan peran anggaran bagi pembangunan nasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitan dengan disetujuinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013, Dewan mengingatkan Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2012 yang ditargetkan sebesar 6,8%. Oleh karena itu, Dewan mendesak Pemerintah untuk meningkatkan penyerapan belanja negara dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, termasuk anggaran belanja modal. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penyerapan anggaran belanja negara pada APBN-P Tahun 2012 sampai Semester I tahun 2012 telah mencapai Rp. 629,4 triliun atau 40,7%. Realisasi penyerapan belanja negara itu mencakup realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 393,9 triliun atau 36,8%, dan realisasi transfer fiskal ke daerah yang mencapai Rp. 235,5 triliun atau 49,2% dari Rp. 412,5 triliun dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012.

Dewan mengingatkan Pemerintah agar serius dalam menyerap anggaran belanja negara, yang tinggal hitungan hari. Dewan memahami bahwa kondisi ini mungkin disebabkan kekhawatiran berbagai kementerian/lembaga dan para Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola anggaran dengan lebih berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan, sehingga berdampak terhadap penyerapan. Namun Dewan juga menilai bahwa hal ini bisa juga terjadi karena perencanaan yang kurang matang dari Kementerian/Lembaga Pemerintah.

Dewan minta Pemerintah memperbaiki secara terus-menerus berkaitan dengan masalah teknis, mekanisme dan prosedur pelaksanaan anggaran negara,

dengan tetap meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban serta memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar, seperti penerapan *good goverment and clean goverment*.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Hal lain yang mendapatkan perhatian Dewan, terkait dengan kebijakan subsidi BBM. Besaran subsidi BBM dalam anggaran tahun 2013 mendatang telah diputuskan bersama berdasarkan perhitungan yang cermat antara Dewan dengan Pemerintah. Dewan mengkhawatirkan akan terjadi peningkatan kuota BBM bersubsidi pada tahun anggaran 2013. Hal itu dikarenakan kuota BBM yang telah disepakati tersebut tergolong besar, sedangkan pengawasan selama ini masih dipandang lemah.

Seperti kita ketahui bahwa produksi minyak siap jual (*lifting*) kita terus menurun setiap tahunnya, sementara pada saat yang sama kebutuhan BBM dalam negeri terus naik. Kondisi ini dipersulit lagi dengan kecenderungan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif. Hal ini tentunya akan berdampak pada semakin meningkatnya subsidi BBM ke depan. Dewan berpendapat bahwa upaya mengelola subsidi BBM secara tepat sasaran akan menjadi salah satu agenda terpenting pilihan kebijakan fiskal sekarang dan di masa depan. Di samping itu, Dewan juga mendorong pemerintah untuk segera memperkuat kebijakan diversifikasi energi yang berbasis energi baru dan terbarukan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Terkait dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, Dewan telah menerima Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2012 yang disampaikan oleh BPK RI. Dari hasil pemeriksaan tersebut terungkap sebanyak 13.105 kasus penyimpangan senilai Rp. 12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 3.976 kasus senilai Rp. 8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sedangkan sisanya sebanyak 9.192 kasus senilai Rp. 3,55 triliun, merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pimpinan Dewan mengharapkan

LHP Semester I yang telah diserahkan ke DPR agar segera dilakukan pengkajian dan penelaahan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Pimpinan Dewan juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan BAKN DPR yang juga telah melakukan telaahan atas Hasil Pemeriksaan Semester I dan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2011, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 yang telah dilaporkan pada Rapat Paripurna 11 September 2012. Hasil telaahan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Komisi-komisi Dewan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

DPR-RI dalam masa sidang ini telah melakukan pengawasan secara efektif, salah satunya terkait dengan pengawasan terhadap Kasus Century. Tim Pengawas Century telah melakukan rapat kerja setiap pekan dengan para penegak hukum yaitu Polri, KPK, Kejaksaan Agung, Tim Pengembalian Aset, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, LPS dan Bank Mutiara. Pada Rapat Tim Century beberapa minggu yang lalu, Timwas menyampaikan keprihatinannya terhadap penanganan nasabah Bank Century yang terkait dengan kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas yang belum mengalami kemajuan dalam penanganannya, padahal Tim Pengawas pada Raker dengan Menkeu, Dirut Bank Mutiara, Ketua LPS beberapa bulan yang lalu telah merekomendasikan untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Tim Pengawas Century dalam kesempatan rapat dengan para penegak hukum, meminta agar kasus century dapat segera diselesaikan, mengingatkan Tim Pengawas akan berakhir masa tugasnya pada Desember 2012 termasuk penuntasan atas proses hukum dan tindak pidana umum dan perbankan, tindak pidana pencucian uang, pencarian aset yang telah dilarikan ke luar negeri dan beberapa hal lainnya.

Penyelenggaraan ibadah haji juga tidak luput dari perhatian Dewan. Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 ini, DPR RI telah mengirimkan Tim Pengawas yang dipimpin oleh 2 (dua) orang Pimpinan DPR-RI yaitu Saudara Pramono Anung dan Saudara Anis

Matta, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan, agar penanganan jemaah haji kita dari tahun ke tahun semakin baik, sehingga para jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadahnya dengan aman, nyaman dan khusus.

Agar kualitas pelayanan haji makin baik, profesional, transparan dan amanah, DPR merencanakan, mengajukan Perubahan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, termasuk mempertimbangkan perlunya pemisahan antara regulator dan operator.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Di bidang penegakan hukum, saat ini banyak kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, seperti silang pendapat penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan simulator SIM, antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara RI (Polri). Kita sudah mendengar pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang hal ini, dan kalangan Dewan dan masyarakat mengapresiasi langkah Presiden dalam menyelesaikan kasus ini. Selanjutnya kita berharap agar KPK dan Polri dapat bekerja secara profesional dalam hal penegakan hukum.

Di bidang penegakan hukum lainnya, kalangan Dewan prihatin dengan adanya beberapa Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan vonis hukuman mati dan pemberian grasi oleh Presiden terhadap beberapa terpidana narkoba. Masyarakat berpendapat bahwa, Indonesia sekarang ini sudah berada dalam "darurat" narkoba. Barang haram ini sudah merambah ke semua lini kehidupan masyarakat, pelajar, mahasiswa, aparat pemerintah termasuk penegak hukum. Pabrik Narkoba tumbuh, dibasmi, tumbuh kembali. Sindikat Narkoba terjalin sangat rapi bahkan di Lembaga Pemasyarakatan sekalipun, oleh karena itu, hukuman tegas terhadap terpidana Narkoba perlu ditegakkan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Hal lain yang menjadi perhatian Dewan ialah fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa, yaitu peristiwa tawuran pelajar dan mahasiswa yang telah memakan korban jiwa. Hal ini sungguh memprihatinkan kita semua, mengingat pelajar/mahasiswa adalah tumpuan bangsa di masa depan. Menurut data hingga pertengahan tahun 2012, tawuran pelajar sudah terjadi 139 kasus dengan korban sedikitnya 17 pelajar/mahasiswa meninggal dunia. Boleh dikatakan bahwa aksi kekerasan ini sudah luar biasa.

Untuk mengantisipasi tawuran pelajar/mahasiswa di masa mendatang, Dewan mendorong agar lembaga pendidikan/sekolah dapat memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti yang berorientasi pada pembentukan sikap dan perilaku. Ada baiknya, pendidikan Pancasila dihidupkan kembali di semua tingkatan pendidikan, tetapi dengan kurikulum yang baru, disesuaikan dengan situasi dan perkembangan saat ini. Dewan juga menekankan, agar lembaga pendidikan/sekolah lebih megefektifkan kegiatan keorganisasian, ruang berkreasi, baik intra maupun ekstrakurikuler sekolah yang mudah diakses serta kondusif, bagi perkembangan mental dan karakter remaja.

Sidang Dewan Yang Saya Hormati,

Beberapa hari yang lalu terjadi demo buruh/pekerja yang menuntut beberapa hal yang bersifat normatif, diantaranya penghapusan tenaga kerja *outsourcing* (alih daya), penolakan upah murah oleh perusahaan, dan tuntutan diberlakukannya BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Tuntutan para pekerja ini merupakan akumulasi kekecewaan mereka terhadap Pemerintah yang belum juga menanggapi tuntutan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan nasib. Padahal pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini dikarenakan adanya peningkatan daya beli, sementara tidak diimbangi peningkatan daya beli kalangan pekerja.

Untuk itu Dewan mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen Hidup Layak, memperbaiki komponen kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan daya beli pekerja dan keluarganya, serta kemampuan membayar upah dari perusahaan sektor UKM

dalam rangka menjamin kesejahteraan pekerja. Disisi lain, dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif, para pekerja juga dituntut untuk meningkatkan produktifitas dan etos kerja.

Terkait dengan *outsourcing*, pada prinsipnya masih tetap bisa dilaksanakan selama UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih berlaku dan belum dilakukan revisi, karena *outsourcing* memang diatur dalam UU tersebut dan hanya untuk 5 (lima) jenis pekerjaan sektor riil yang meliputi: tenaga kerja di sektor katering, penyedia jasa transportasi karyawan, tenaga kebersihan, jasa penunjang di sektor industri perminyakan, dan tenaga keamanan.

Untuk menjawab tantangan dari para tenaga kerja tersebut, Dewan mendesak agar Pemerintah segera mengundang beberapa peraturan yang terkait, seperti pengundangan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diamanatkan dalam UU No 13 Tahun 2003 dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, untuk menjamin pemenuhan kelangsungan pekerjaan dan kepastian hak-hak pekerja *outsourcing*, pengawasan dan *law enforcement*, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melaksanakan *outsourcing* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selama Masa Sidang I ini, DPR RI juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan diplomasi parlemen yang cukup penting. Tidak hanya mengirimkan delegasi ke berbagai pertemuan antar parlemen di luar negeri, tetapi juga telah melaksanakan tugas sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-33. Sidang yang dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17-22 September 2012, dihadiri oleh delegasi parlemen dari 10 (sepuluh) negara anggota AIPA serta 9 (sembilan) delegasi parlemen negara-negara peninjau. Sidang tersebut telah berlangsung dengan lancar dan sukses, serta mendapat apresiasi dari seluruh delegasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat perkembangan signifikan yang perlu terus kita dukung, yaitu meningkatnya partisipasi anggota parlemen perempuan dalam sidang tersebut, yakni mencapai 25% dari total anggota parlemen AIPA yang hadir.

Sidang Umum AIPA yang bertemakan *Strengthening the Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015* telah menghasilkan sebuah Komunike Bersama dan menyepakati 12 resolusi. Resolusi-resolusi yang dicapai melalui serangkaian sidang yang diwarnai dengan diskusi dan perdebatan konstruktif tersebut, mencerminkan visi dan upaya AIPA untuk turut berkontribusi bagi terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Di samping itu, dihasilkan pula 11 resolusi yang berkaitan dengan isu keorganisasian AIPA.

Masih berkaitan dengan kegiatan diplomasi parlemen, delegasi Indonesia baru saja menghadiri *Asia-Europe Parliamentary Partnership ke-7* yang dilaksanakan pada 2-4 Oktober 2012 lalu di Vientiane, Laos. Pertemuan yang bertema *Asia-Europe Partnership for Sustainable Development* tersebut, membahas berbagai masalah di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pada akhir pertemuan disepakati sebuah Deklarasi yang memuat upaya bersama dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan di wilayah Asia dan Eropa. Deklarasi tersebut menekankan perlunya kerjasama yang lebih erat untuk mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, perubahan iklim global, pengelolaan hutang publik, serta pengurangan resiko bencana maupun pengelolaannya.

Perlu kami sampaikan pula, bahwa saat ini delegasi DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tengah menghadiri Sidang *Inter-Parliamentary Union ke-127* di Quebec City, Canada, yang berlangsung pada tanggal 21-26 Oktober 2012. Selain topik-topik yang dibahas melalui tiga *standing committee*, sidang kali ini memberikan perhatian khusus mengenai *Citizenship, identity and linguistic and cultural diversity in a globalized world*.

Sebelumnya, delegasi DPR-RI telah menghadiri Extraordinary Session of The Executive Committee Inter-Parliamentary Union pada bulan Agustus 2012. Di sela-sela pertemuan Excom, dilakukan pertemuan *Special Gender Partnership Session* dengan tema *Gender Sensitive Parliaments*, yang antara lain menetapkan bahwa anggota delegasi Excom Dr. Nurhayati Ali Assegaf akan menjadi *Co-Rapporteur Special Debate on Citizenship, Identity and Linguistic and Cultural Diversity in a Globalized World*.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Di tengah kekhawatiran masyarakat internasional atas sejumlah ketegangan yang sedang berlangsung di beberapa kawasan dunia, sebuah langkah besar tengah terjadi di negara tetangga kita, Filipina. Pada tanggal 7 Oktober 2012 lalu, Presiden Filipina menyatakan telah tercapai kesepakatan awal perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Tercapainya kesepakatan tersebut merupakan cerminan kesungguhan Pemerintah Filipina dalam upaya menciptakan perdamaian yang komprehensif di Filipina Selatan. Bagi Indonesia, yang selama hampir 20 tahun telah berperan sebagai fasilitator proses perdamaian antara Pemerintah Filipina dan MILF, tentunya ini merupakan perkembangan yang sungguh menggembirakan. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan, Dewan bersama-sama dengan Pemerintah harus senantiasa memberikan dukungan dan bantuan, termasuk dalam berbagi pengalaman, sehingga dapat tercapai penyelesaian yang komprehensif atas konflik yang telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi selama 4 dekade tersebut.

Dewan juga menyambut baik Pidato Presiden RI di Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu, yang menyuarakan perlunya konsensus internasional untuk mencegah permusuhan berlatarbelakang agama. Dewan sejalan dengan pandangan Pemerintah Indonesia, bahwa suatu protokol internasional anti-penistaan agama, memang dibutuhkan. Dalam kaitan ini pula, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keragaman budaya dan agama, dan sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia perlu menyerukan sikap saling menghormati dan pengertian di antara penganut keyakinan yang berbeda-beda.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Beberapa hari yang lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah dilantik yaitu, Sdr. Joko Widodo sebagai Gubernur dan Sdr. Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta. Kita semua menyambut baik terpilihnya gubernur dan wakil gubernur baru, dengan harapan bahwa pasangan ini mampu memajukan DKI Jakarta sebagai Ibukota

Negara, dan mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat Jakarta dalam segala aspek, yang bermuara pada terealisasinya Jakarta yang aman, nyaman, tertib, dan bermartabat. Kepada Saudara Fauzi Bowo dan Saudara Prijanto yang telah memimpin DKI selama lima Tahun, kita ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya memajukan DKI Jakarta.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2012–2013 dan beberapa kegiatan yang kami angkat dalam kesempatan ini. Besok pagi, 26 Oktober 2012 adalah Hari Raya Idul Adha 1433 H atau Hari Raya Qurban. Diharapkan, Hari Raya Qurban ini menjadi momentum bagi kita untuk siap berqurban bagi kemaslahatan umat dan berkontribusi kepada mereka yang tidak mampu yang perlu mendapatkan perhatian kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan rahmatNya kepada kita sekalian. Amin. Sekian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 25 Oktober 2012

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. MARZUKI ALIE